

DAFTAR ISI

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
	Sampul Dalam	i
	Halaman Pengesahan	ii
	Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
	Kata Pengantar	iv
	Daftar Isi	vi
	Daftar Gambar	x
	Daftar Tabel	ix
	Daftar Lampiran	xii
	Singkatan	xiii
	Definisi	xiv
	Abstrak	xvi
	<i>Abstract</i>	xvii
I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3.	Tujuan Penelitian	9
1.4.	Manfaat Penelitian	9
1.5.	Keaslian penelitian	10
II.	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
2.1.	Tinjauan Pustaka	12
2.2.	Landasan Teori	15
2.2.1.	Rezim Kehutanan Internasional	16
2.2.2.	Desentralisasi	18
2.2.2.1.	Penggolongan Desentralisasi	19
2.2.2.2.	Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus di Tanah Papua	20
2.2.2.3.	<i>Reinventing</i> Pemerintah Daerah	22
2.2.2.4.	Tata Kelola Kehutanan	26
2.2.2.5.	Diskursus UU.23/2014 dan Kebijakan Hutan	26
2.2.3.	Kelembagaan	27
2.2.4.	Pengelolaan Sumberdaya Alam Milik Bersama	31
2.2.5.	Kearifan Lokal Masyarakat Bagi Konservasi Sumberdaya Alam	32
2.2.6.	Kontestasi Konservasi Tradisional dan Konservasi Modern	34
2.2.7.	Konservasi Global dan Lokal	36
2.2.8.	Pengertian Daya Dukung Lingkungan	37
2.2.9.	Arah Pemanfaatan Ruang Berbasis Konservasi	40
2.2.10.	Batasan dan Pengertian Kabupaten Konservasi	42

2.2.11. Kawasan Konservasi	44
2.2.12. Teori Power	48
2.2.13. Kerangka Teori <i>Actor Center Power</i>	49
2.2.14. Teori Politik Birokrasi	52
2.2.15. Manajemen Adaptif	53
2.2.16. Kerangka Teori Penelitian	55
III. METODA PENELITIAN	59
3.1. Pendekatan Penelitian	59
3.2. Lokasi, Tempat dan Waktu	59
3.3. Sampel Penelitian	60
3.4. Pengumpulan data	60
3.5. Analisis Data	63
3.5.1. Kontestasi Konservasi Sumberdaya Kawasan Konservasi	63
3.5.2. Penilaian Faktor Pemungkin Kabupaten Konservasi	64
3.5.3. Analisis <i>Power</i> dalam mengkaji dinamika aktor yang berpengaruh dan kepentingannya dalam kebijakan Kabupaten Konservasi	64
3.5.4. Analisis Biogeofisik Wilayah dan Tekanan Penduduk	65
3.5.5. Strategi Pengembangan Kabupaten Konservasi Menggunakan Analisis SWOT	69
3.5.6. Analisis Data Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi ...	70
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	71
4.1. Letak Geografis dan Administrasi	71
4.2. Kondisi Iklim	71
4.3. Topografi	72
4.4. Kepemilikan lahan	72
4.5. Kependudukan	73
4.6. Aksesibilitas	74
4.7. Sumber Mata Pencarian	75
4.8. Pola Interaksi Masyarakat dengan Sumberdaya Alam	75
V. KONTESASI PEMBENTUKAN DAN KELAYAKAN KABUPATEN KONSERVASI.	
5.1. Kritik Terhadap Sentralisasi Menjadi Otonomi Daerah	77
5.2. Kontestasi Sumberdaya Kawasan Konservasi	83
5.2.1. Kabupaten Konservasi: Inisiatif Pemerintah Daerah untuk konservasi Adaptif dan memperkecil ruang kontestasi	85
5.2.2. Koalisi Bersama Untuk Mendorong Pembentukan Kabupaten Konservasi	87
5.2.3. Transfer Kekuatan dan Dukungan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan	93
5.2.4. Inisiasi Pembentukan Kabupaten Konservasi; Menggalang Argumentasi bagi Pengarustamaan Kabupaten Konservasi	94
5.3. Hutan Konservasi Dalam Perspective Orang Asli Papua	100

5.4. Koalisi Birokrat Papua Barat guna mendapatkan pendnaan Pusat bagi pembangunan Konservasi	104
5.5. Indikasi Konsesi Pertambangan dan Kehutanan Sebagai Hotspot pengembangan kabupaten konservasi.....	107
5.6. Kelayakan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi	
5.6.1. Faktor-faktor Pemungkin Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi	113
5.6.2. Nilai Kelayakan Penetapan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi	131
5.7. Peran Aktor dan Sumber <i>Power</i> Dalam Pembentukan Kawasan Konservasi Hingga Kabupaten Konservasi	133
5.7.1. Kawasan Konservasi di Papua	133
5.7.2. Kawasan Konservasi di Tambrau	136
5.7.3. Penunjukkan Kawasan Hutan Papua Barat	137
5.7.4. Aktor Penunjukkan Kawasan Konservasi Hingga	
Pembentukan Tambrau sebagai Kabupaten konservasi	138
5.7.5. Sumber <i>Power</i> Dalam Penunjukkan Kawasan Konservasi Hingga	
Pembentukan Tambrau sebagai Kabupaten konservasi	148
5.8 . Kesimpulan	163

VI. KONDISI BIOGEOFISIK, ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN DAN TEKATAN PENDUDUK TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

6.1. Kelerengan Lahan	165
6.2. Jenis Tanah.....	166
6.3. Curah Hujan	167
6.4. Kondisi Hutan Sesuai Sesuai Kemampuan Lahan	167
6.5. Kondisi Tutupan Lahan.....	171
6.6. Kondisi Hutan Sesuai Fungsi kawasan	173
6.7. Kondisi Hutan Sesuai RTRW	175
6.8. Tekanan Penduduk Terhadap Kawasan Lindung.....	179
6.9. Arah Pemanfaatan Ruang Dalam Kabupaten Konservasi	184
6.10. Arah Lokasi Implementasi Kabupaten konservasi	191
6.11. Kesimpulan	193

VII. STRATEGI PENGEMBANGAN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

7.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	195
7.1.1. Faktor Internal.....	195
7.1.2. Faktor Eksternal.....	200
7.2. Evaluasi Faktor Kunci.....	203
7.3. Analisis SWOT	206
7.4. Formulasi Strategi	207
7.5. Kesimpulan	217

7.6. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi

7.6.1. Desain Model Kelembagaan	219
7.6.2. Variabel-variabel Penyusun Kelembagaan	219
7.6.3. Model Kelembagaan	219
7.6.4. Performasi Kelembagaan	220
7.7. Kesimpulan	236
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN	238

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1.	Arah Pendulum Pembagian Kewenangan Pengelolaan Hutan	27
Gambar 2.2.	Proses Adaptif	55
Gambar 2.3.	Kerangka Teori Penelitian	58
Gambar 3.1.	Peta Lokasi Penelitian	59
Gambar 3.2.	Prosedur Penelitian dan Analisis Biogeofisik	67
Gambar 4.1.	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tambrau Sesuai Kelerengan .	72
Gambar 5.1.	Kontestasi Negara dan Masyarakat Atas Kawasan Konservasi	86
Gambar 5.2.	Kebijakan Pendukung Kabupaten Konservasi	90
Gambar 5.3.	Peta Indikasi Konsesi Tambang dan Kehutanan di Kabupaten Tambrau.....	109
Gambar 5.4.	Trend Perubahan Sub Sektor Kehutanan.....	127
Gambar 5.5.	Trend Alokasi APBD untuk kegiatan Konservasi.....	128
Gambar 5.6.	Aktor <i>Powerfull</i> Dalam Alokasi Penunjukkan Kawasan Hutan 1980-1999	151
Gambar 5.7.	Aktor <i>Powerfull</i> Dalam Alokasi Penunjukkan Kawasan Hutan 1999-2010	153
Gambar 5.8.	Aktor <i>Powerfull</i> Dalam Pembentukan Kabupaten Konservasi	158
Gambar 6.1.	Peta Kemampuan Lahan Di Kabupaten Tambrau	171
Gambar 6.2.	Penutupan Lahan Per Distrik di Kabupaten Tambrau	172
Gambar 6.3.	Peta Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Tambrau	172
Gambar 6.4.	Fungsi Hutan di Kabupaten Tambrau.....	175
Gambar 6.5.	Peta Penggunaan Lahan Tanpa Ijin sesuai RTRW Kabupaten Tambrau	178
Gambar 6.6.	Peta Sebaran Indeks Tekanan Penduduk Di Kabupaten Tambrau ..	183
Gambar 6.7.	Peta Arahan Pemanfaatan Lahan Dalam Kabupaten Konservasi	187
Gambar 6.8.	Peta Arahan implementasi Kabupaten Konservasi Tingkat Tapak	192
Gambar 7.1.	Peta Posisi Kuadran.....	198
Gambar 7.2.	Matriks SWOT Pengembangan Kabupaten Konservasi.....	199
Gambar 7.3.	Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi	214
Gambar 7.4.	Deskripsi Hasil Perbandingan Model Kelembagaan OPD dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi.....	217

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1.	Penelitian Terkait Kab Konservasi, Power, Alokasi Penggunaan Lahan dan Kebijakan.....	14
Tabel 2.2.	Kriteria dan Indikator Tata Kelola Kehutanan.....	25
Tabel 2.2.	Elemen Power	52
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tambrauw Berdasarkan Jenis Kelamin...	73
Tabel 5.1.	Areal Hotspot di Kabupaten Tambrauw.....	108
Tabel 5.2.	Hasil Penilaian Aspek Biofisik	115
Tabel 5.3.	Hasil Penilaian Aspek Komitmen Politik	117
Tabel 5.4.	Hasil Penilaian Aspek Kelembagaan	120
Tabel 5.5.	Hasil Penilaian Aspek Ekonomi.....	125
Tabel 5.6.	Peranan PDRB Kabupaten Tambrauw	126
Tabel 5.7.	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Tambrauw	127
Tabel 5.8.	Kontribusi Hasil Hutan Terhadap Rumah Tangga	131
Tabel 5.9.	Nilai Kelayakan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi	132
Tabel 5.10.	Tata Guna Hutan Kesepakatan 1990	136
Tabel 5.11.	Luas Hutan Tambrauw Sebelum Pemekaran	137
Tabel 5.12.	Penunjukkan Kawasan Hutan Tambrauw 2014	137
Tabel 5.13.	Klasifikasi Aktor dan Perannya dalam pembentukan Kawasan konservasi	139
Tabel 6.1.	Tipe Kemiringan Lahan	165
Tabel 6.2.	Jenis Tanah.....	166
Tabel 6.3.	Curah Hujan Rata-Rata	167
Tabel 6.4.	Luas Kemampuan Lahan (Pembobotan) di Kabupaten Tambrauw	168
Tabel 6.5.	Luas Kemampuan Lahan (tanpa pembobotan) di Kabupaten Tambrauw	169
Tabel 6.6.	Fungsi Kawasan Hutan Per Distrik	173
Tabel 6.7.	Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Ijin di Kabupaten Tambrauw.....	174
Tabel 6.8.	Kondisi Hutan Berdasarkan RTRW Kabupaten Tambrauw	176
Tabel 6.9.	Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Ijin di Kabupaten Tambrauw.....	177
Tabel 6.10.	Nilai Tekanan Penduduk Terhadap Lahan	180
Tabel 6.11.	Luas Arahkan Kawasan Budidaya pada Tiap distrik di Kabupaten Tambrauw	185
Tabel 7.1.	Faktor Kunci Keberhasilan.....	203
Tabel 7.2.	Evaluasi Faktor Internal Pembentukan kabupaten Konservasi	204
Tabel 7.3.	Evaluasi Faktor Eksternal Pembentukan kabupaten Konservasi	204
Tabel 7.4.	Kearifan Lokal Masyarakat Tambrauw	227
Tabel 7.5.	Tempat Pamali Masyarakat Tambrauw	233

DAFTAR LAMPIRAN

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Tabel Penilaian Pada Indikator Kelayakan Kabupaten Konservasi	249
2.	Data Informan Penelitian.....	253
3.	Hasil Analisis SWOT	262
4.	Rincian Waktu FGD dan Konsultasi Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi	266
5.	Tabel Penilaian Actor pada III Periode Waktu	267
6.	Tabel Perhitungan Tekanan Penduduk di Kabupaten Tambrau	270
7.	Hasil Uji-t perbandingan Kelembagaan OPD (Eksisting) dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi	271

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CA	: Cagar Alam
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Dirjen	: Direktur Jenderal
EFI	: Evaluasi Faktor Internal
EFE	: Evaluasi Faktor Eksternal
FKK	: Faktor Kunci Keberhasilan
HHBK	: Hasil Hutan Buka Kayu
HHK	: Hasil Hutan Kayu
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NU	: Nilai Urgensi
NBF	: Nilai Bobot Faktor
NBD	: Nilai Bobot Dukungan
NK	: Nilai Keterkaitan
NBK	: Nilai Bobot Keterkaitan
NGO	: Non Government Organisasi
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	: Otonomi Khusus
OTDA	: Otonomi Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumberdaya Alam
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity dan Threats
REDD	: Reducing Emission From Deforestation dan Degradation

DEFINISI

- Kawasan Lindung** : Kawasan Lindung dalam Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 32 Tahun 1990 diartikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
- Hutan Lindung** : Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidroorologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.
- Kawasan Budi daya** : Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- Cagar Alam** : Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- Suaka Margasatwa** : Kawasan suaka alam yang mempunyai cirri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- Tata Ruang** : Wujud struktur ruang dan pola ruang.
- Struktur Ruang** : Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional
- Pola Ruang** : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah : Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.